BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1.Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja PD juga merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023 ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung yang dituangkan kedalam kebijakan Koperasi dan UKM melalui peningkatan kompetensi serta daya saing usaha mikro dan koperasi.

1.1.2.Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan

   Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun

Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bandung dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menyampaikan seluruh Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dari rancangan awal renja sampai Rancangan Awal Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bandung untuk diverifikasi.

Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Awal Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

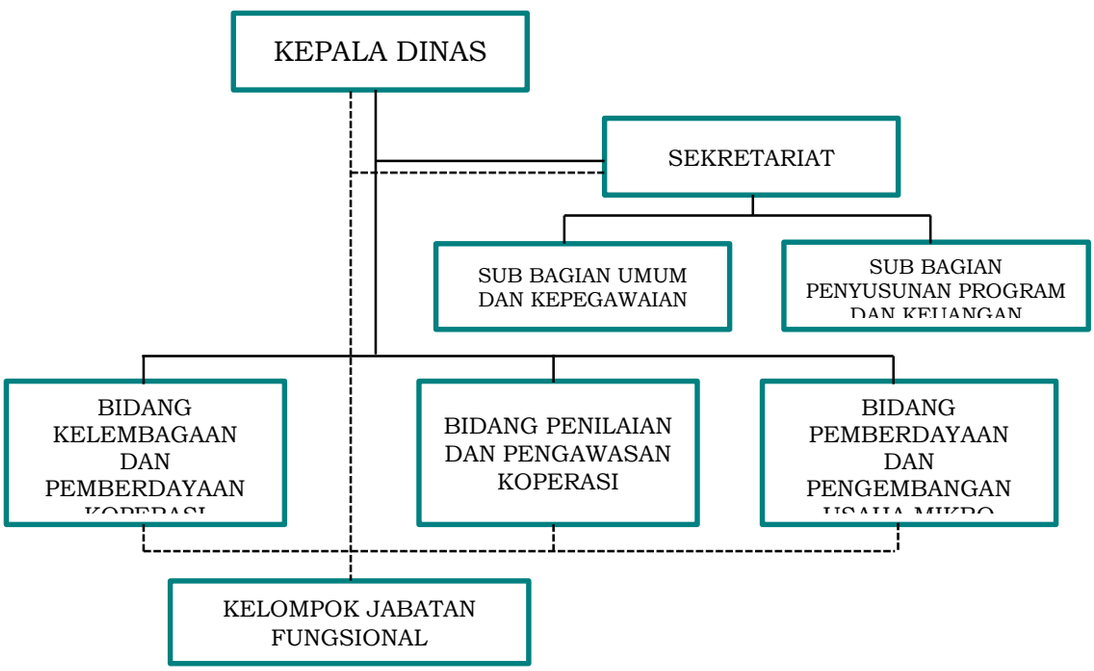
1.2 LANDASAN HUKUM

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung sesuai gambar 1.1 :



Gambar 1.1. Gambaran struktur organisasi Diskop-UKM

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan pelaksaan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Adapun peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung selama Tahun 2023.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung;
2. Menjabarkan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2023. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2023;
4. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III : **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan

BAB IV : **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja

BAB V : **PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi;
b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
c. Tujuan yang dikehendaki;
d. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
e. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan kerja tahun anggaran 2023;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, Diskop UKM Kabupaten Bandung melaksanakan 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja dan program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja. Berikut ini merupakan capaian kinerja masing-masing program pada Renja Diskop UKM Kabupaten Bandung Tahun 2021 :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR				KRITERIA KINERJA
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualiitas	Persentase Koperasi Berkualitas	4,5%	5,97%	132,67%	Sangat Baik
		Persentase Pertumbuhan Koperasi yang RAT	4%	6,91%	172,75%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Poduktivitas Usaha Mikro	Persentase UMKM yang memiliki sertifikat standar produk	18%	18,09%	100,50%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Tatakelola permerintahan Instansi Diskop-UKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskop UKM	73 Poin	75,87 Poin	103,93%	Sangat Baik
		Persentase aset dalam kondisi baik	70%	93,71%	133,87%	Sangat Baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Poin	82,22 Poin	101,50%	Sangat Baik

Hasil Analisis Diskop UKM, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dengan indikator sasaran Persentase Koperasi Berkualitas sebesar 5,97% melebihi dari target yaitu 4,5% atau terealisasi sebesar 132,67% dan Persentase Pertumbuhan Koperasi yang RAT sebesar 6,91% mencapai target, dari target yaitu 4% atau terealisasi sebesar 172,75%.

2. Meningkatnya Poduktivitas Usaha Mikro dengan indikator sasaran Persentase UMKM yang memiliki sertifikat standar produk sebesar 18,09% mencapai target, dari target yaitu 18% atau terealisasi sebesar 100,50%.

3. Meningkatnya Tatakelola permerintahan Instansi Diskop-UKM dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar 75,87 Poin kategori BB dengan interpretasi **"Sangat Baik"** (akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal)**,** melebihi dari target yaitu 70 Poin atau terealisasi sebesar 103,93%, Persentase aset dalam kondisi baik sebesar 93,71%, melebihi dari target sebesar 70% atau terealisasi sebesar 133,87%. dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,22 Poin, melebihi dari target yaitu sebesar 81 Poin atau terealisasi sebesar 101,50%.

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Diskop UKM sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Diskop UKM dan Pencapaian Renstra Diskop UKM
Sampai dengan Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**76,02 Poin**	**- Poin**	**74,82 Poin**	**- Poin**	**0,00**	**74,82 Poin**	***74,82* Poin**	**98,42**
		Nilai IKM	**85,25 Poin**	**- Poin**	**81,77 Poin**	**- Poin**	**0,00**	**81,77 Poin**	***81,77* Poin**	**95,92**
		Aset dalam Kondisi Baik	**96,82 %**	**- %**	**94,82 %**	**- %**	**0,00**	**94,82 %**	***94,82* %**	**97,93**
2.17.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan***	***100* %**	**- %**	***100* %**	***62* %**	***61,90***	***38* %**	***100* %**	***100,00***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	25 Dokumen	- Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80,00	1 Dokumen	5 Dokumen	20,00
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang diselesaikan secara tepat waktu	5 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang diselesaikan secara tepat waktu	5 Dokumen	- Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang diselesaikan secara tepat waktu	5 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang diselesaikan secara tepat waktu	5 Dokumen	- Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu	25 Dokumen	- Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80,00	1 Dokumen	5 Dokumen	20,00
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Dinas yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu	15 Dokumen	- Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	2 Dokumen	3 Dokumen	20,00
2.17.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas***	***100 %***	***- %***	***100 %***	***39 %***	***39,13***	***61 %***	***100 %***	***100,00***
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan	60 Bulan	- Bulan	14 Bulan	7 Bulan	50,00	7 Bulan	14 Bulan	23,33

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		tunjangan pegawai Diskop UKM								
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen kelengkapan verifikasi keuangan dinas	5 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	10 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2 Dokumen	20,00
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas	5 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan tanggapan pemeriksaan	5 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	10 Laporan	- Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0,00	2 Laporan	2 Laporan	20,00
2.17.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD***	***100 %***	***- %***	***100 %***	***0 %***	***0,00***	***100 %***	***100 %***	***100,00***
2.17.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan/ Analisa	5 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Barang Milik Daerah SKPD	Kebutuhan Barang Milik Daerah								
2.17.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
2.17.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen inventarisasi aset	5 Dokumen	- Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2 Dokumen	40,00
2.17.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian***	***100 %***	***% -***	***100 %***	***87 %***	***86,96***	***13 %***	***100 %***	***100,00***
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	5 Dokumen	- Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	2 Dokumen	3 Dokumen	60,00
2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Laporan	- Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00	1 Laporan	2 Laporan	20,00
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Penilain Kinerja Pegawai	5 Laporan	- Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0,00	3 Laporan	3 Laporan	60,00
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	190 Orang	- Orang	38 Orang	38 Orang	100,00	0 Orang	38 Orang	20,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran***	***100 %***	***% -***	***20 %***	***10 %***	***51,15***	***10 %***	***20 %***	***20,00***
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	55 Jenis	Jenis -	11 Jenis	0 Jenis	0,00	11 Jenis	11 Jenis	20,00
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	315 Jenis	Jenis -	61 Jenis	53 Jenis	86,89	8 Jenis	61 Jenis	19,37
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	35 Jenis	Jenis -	8 Jenis	5 Jenis	62,50	3 Jenis	8 Jenis	22,86
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	60 Jenis	Jenis -	14 Jenis	1 Jenis	7,14	13 Jenis	14 Jenis	23,33
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan (surat kabar lokal, regional dan nasional) yang dibeli	12050 Eksemplar	Eksemplar -	1616 Eksemplar	940 Eksemplar	58,17	676 Eksemplar	1.616 Eksemplar	13,41
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang dibeli	5 Jenis	Jenis -	0 Jenis	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0 Jenis	0,00
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Snack, Makanan dan Minuman untuk Tamu	3020 Porsi	Porsi -	568 Porsi	253 Porsi	44,54	315 Porsi	568 Porsi	18,81
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1485 HOK	HOK -	256 HOK	86 HOK	33,59	170 HOK	256 HOK	17,24

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25 Poin	Poin -	81,77 Poin	Poin	0,00	81,77 Poin	81,77 Poin	95,92
2.17.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***	***96,82 %***	***% -***	***94,82 %***	***0 %***	***0,00***	***94,82 %***	***94,82 %***	***97,93***
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel yang dibeli	9 Jenis	Jenis -	1 Jenis	0 Jenis	0,00	1 Jenis	1 Jenis	11,11
2.17.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran***	***100 %***	***% -***	***20 %***	***10 %***	***50,00***	***10 %***	***20 %***	***20,00***
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran jasa layanan komunikasi, air, dan listrik	60 Bulan	Bulan -	12 Bulan	6 Bulan	50,00	6 Bulan	12 Bulan	20,00
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	Bulan -	12 Bulan	6 Bulan	50,00	6 Bulan	12 Bulan	20,00
2.17.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***	***96,82 %***	***% -***	***94,82 %***	***0 %***	***0,00***	***94,82 %***	***94,82 %***	***97,93***
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	5 Unit	Unit -	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	1 Unit	20,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Roda 2 / Roda 4 yang dipelihara	90 Unit	Unit -	18 Unit	5 Unit	27,78	13 Unit	18 Unit	20,00
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang dipelihara	200 Unit	Unit -	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0 Unit	0,00
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang diperbaiki	150 Unit	Unit -	19 Unit	7 Unit	36,84	12 Unit	19 Unit	12,67
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor atau bangunan	20 Jenis	Jenis -	1 Jenis	0 Jenis	0,00	1 Jenis	1 Jenis	5,00
02:17:02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi yang berizin**	**75** %	% -	**55** %	**0** %	**0,00**	**55** %	**55** %	**73,33**
2.17.02.01	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota***	***35*** %	% -	***7*** %	***0*** %	***0,00***	***7*** %	***7*** %	***20,00***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi	50 Koperasi	- Koperasi	10 Koperasi	0 Koperasi	0,00	10 Koperasi	10 Koperasi	20,00
2.17.02.02	***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi yang difasilitasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas***	***20*** %	- %	***4*** %	***0*** %	***0,00***	***4*** %	***4*** %	***20,00***
2.17.02.02.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	25 Koperasi	- Koperasi	5 Koperasi	0 Koperasi	0,00	5 Koperasi	5 Koperasi	20,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Patuh**	**100** %	% -	**20** %	**9,4** %	**47,00**	**10,6** %	**20** %	**20,00**
2.17.03.2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diperiksa dan diawasi***	**100** %	% -	***20*** %	***13*** %	***65,73***	***7*** %	***20*** %	***20,00***
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi	155 Koperasi	Koperasi -	25 Koperasi	2 Koperasi	8,00	23 Koperasi	25 Koperasi	16,13
		Jumlah koperasi yang mengikuti workshop/ pelatihan/ bimtek perkoperasian	675 Koperasi	Koperasi -	200 Koperasi	175 Koperasi	87,50	25 Koperasi	200 Koperasi	29,63
		Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Koperasi Berkualitas	15 Koperasi	Koperasi -	3 Koperasi	0 Koperasi	0,00	3 Koperasi	3 Koperasi	20,00
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kepatuhannya	500 Koperasi	Koperasi -	160 Koperasi	80 Koperasi	50,00	80 Koperasi	160 Koperasi	32,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi	15 Koperasi	- Koperasi	3 Koperasi	0 Koperasi	0,00	3 Koperasi	3 Koperasi	20,00
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**100** %	- %	**20** %	**13,3** %	**66,65**	**6,7** %	**20** %	**20,00**
2.17.04.2.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya***	**100** %	- %	***20*** %	***19*** %	***95,24***	***1*** %	***20*** %	***20,00***
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai kesehatannya	300 Koperasi	- Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	100,00	0 Koperasi	60 Koperasi	20,00
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan koperasi sehat	15 Koperasi	- Koperasi	3 Koperasi	0 Koperasi	0,00	3 Koperasi	3 Koperasi	20,00
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten**	**27,1** %	- %	**13,2** %	**4,61** %	**34,92**	**8,59** %	**13,20** %	**48,71**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.05.2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan koperasi***	***20*** %	% -	***4*** %	***0*** %	***0,00***	***4*** %	***4*** %	***20,00***
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pra koperasi yang mengikuti kegiatan pemahaman perkoperasian	118 Pra Koperasi	- Pra Koperasi	46 Pra Koperasi	8 Pra Koperasi	17,39	38 Pra Koperasi	46 Pra Koperasi	38,98
		Jumlah SDM koperasi yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi	500 Orang	- Orang	80 Orang	0 Orang	0,00	80 Orang	80 Orang	16,00
		Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	0 Orang	- Orang	102 Orang	100 Orang	98,04	2 Orang	102 Orang	0,00
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi**	**2,5** %	% -	**0,5** %	**0** %	**0,00**	**0,50** %	**0,50** %	**20,00**
2.17.06.2.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase koperasi yg difasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi koperasi***	***100*** %	% -	***100*** %	***34*** %	***34,25***	***66*** %	***100*** %	***100,00***
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai	Jumlah kegiatan promosi hasil produk usaha koperasi	15 Kegiatan	- Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	4 Kegiatan	4 Kegiatan	26,67

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi penerima akses permodalan yang dimonitoring dan dievaluasi	500 Koperasi	- Koperasi	50 Koperasi	0 Koperasi	0,00	50 Koperasi	50 Koperasi	10,00
		Jumlah koperasi yang difasilitasi kelembaga permodalan	500 Koperasi	- Koperasi	50 Koperasi	25 Koperasi	50,00	25 Koperasi	50 Koperasi	10,00
		Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan dengan pihak lain (antar koperasi, perusahaan dan buyer)	150 Koperasi	- Koperasi	115 Koperasi	50 Koperasi	43,48	65 Koperasi	115 Koperasi	76,67
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Kapasitas Usaha Mikro**	**21,25** %	% **-**	**4,25** %	**1,01** %	**23,80**	**3,24** %	**4,25** %	**20,00**
2.17.07.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Persentase usaha mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan***	***21,25*** %	% -	***4,25*** %	***1,01*** %	***23,80***	***3,24*** %	***4,25*** %	***20,00***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi dan pengembangannya	10 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	10,00
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dengan BUMN/BUMD atau Perusahaan Besar	1400 UMKM	- UMKM	300 UMKM	120 UMKM	40,00	180 UMKM	300 UMKM	21,43
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi Perizinan Usaha Mikro	1750 UMKM	- UMKM	300 UMKM	50 UMKM	16,67	250 UMKM	300 UMKM	17,14
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan UMKM	10 Kegiatan	- Kegiatan	6 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	6 Kegiatan	6 Kegiatan	60,00
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan bagi UMKM	15 Kegiatan	- Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25,00	3 Kegiatan	4 Kegiatan	26,67
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil**	**50** %	- %	**10** %	**2,22** %	**22,16**	**8** %	**10** %	**20,00**
2.17.08.2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil***	***50*** %	- %	***10*** %	***2,22*** %	***22,16***	***8*** %	***10*** %	***20,00***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Juni Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	K	K	K	K %	K		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi produk bagi UMKM	20 Kegiatan	- Kegiatan	14 Kegiatan	2 Kegiatan	14,29	12 Kegiatan	14 Kegiatan	70,00
		Jumlah UMKM yang mengikuti inkubasi bisnis bagi UMKM	500 UMKM	- UMKM	60 UMKM	0 UMKM	0,00	60 UMKM	60 UMKM	12,00
		jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	9925 UMKM	- UMKM	2175 UMKM	175 UMKM	8,05	2.000 UMKM	2.175 UMKM	21,91
		jumlah UMKM yang mengikuti Pendampingan bagi UMKM	500 UMKM	- UMKM	920 UMKM	233 UMKM	25,33	687 UMKM	920 UMKM	184,00
		Luas lahan ±2000 M2 yang dimatangkan	0 Paket	- Paket	1 Paket	0 Paket	0,00	1 Paket	1 Paket	0,00
		Jumlah fasilitasi sarana prasarana yang tersedia	0 Paket	- Paket	1 Paket	0 Paket	0,00	1 Paket	1 Paket	0,00
		Gedung PLUT yang terbangun	0 Paket	- Paket	1 Paket	0 Paket	0,00	1 Paket	1 Paket	0,00

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2022

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOP UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tidak memiliki indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung menetapkan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016 – 2020 akan dijelaskan secara rinci. Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan dan sebagai landasan untuk penyusunan kebijakan baru dalam memfasilitasi Koperasi dan UKM untuk semakin berdaya saing.

1. Perkembangan Koperasi

   Perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung saat ini menunjukkan kinerja yang baik selama 10 tahun terakhir. Jika dilihat dari pertumbuhannya, jumlah koperasi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 8% jumlah koperasi dari 1532 koperasi menjadi 1652 koperasi. Dari 1652 koperasi terdapat 866 koperasi aktif atau terjadi kenaikan 10% selama 10 tahun terakhir. Dan terdapat 786 koperasi yang tidak aktif atau terjadi peningkatan 6% selama 10 tahun terakhir. Jumlah koperasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Dari total koperasi yang ada, jika ditinjau dari jumlah koperasi hanya sekitar 51% koperasi yang berstatus aktif.

   Dilihat dari volume usaha, terdapat peningkatan volume usaha selama 10 tahun terakhir. Dan jika dilihat capaian dalam 5 tahun terakhir, dari 2016 – 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp. 585.110.682.769 menjadi Rp. 1.075.426.723.732. Untuk Modal sendiri mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 adalah Rp.

415.649.498.505 dan di tahun 2020 menjadi Rp. 357.244.279.776.

Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan dari sebanyak 89.039 orang pada tahun 2016 menjadi 91.652 orang pada tahun 2020. Anggota koperasi yang paling dominan adalah laki-laki.

2. Perkembangan UMKM

Untuk Kabupaten Bandung fokus pemberdayaan dan pengembangan usaha pada usaha mikro saja. Jumlah usaha mikro tahun 2020 adalah sebanyak 17.755 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan 6% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, jenis usaha yang dimiliki adalah jenis usaha kuliner yaitu sebesar 54% dari jumlah seluruh UMKM. Untuk fashion masuk ke dalam jenis usaha terbesar kedua yaitu 29%, Kerajinan 3%, dan lainnya adalah 14%..

Selanjutnya akan membahas mengenai kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM selama periode 5 tahun kebelakang yaitu tahun 2016 – 2020. Capaian kinerja dapat ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran, target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. (T-C.30)
Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Diskop UKM

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase UMKM yang memiliki sertifikat standar produk (%)	-	-	-	20	21	26	30	23	24	7	18,09	115%	114%	27%	23,33%
2	Persentase Koperasi Sehat (%)	-	-	-	18	20	22	24	16	26	22	24	89%	130%	100%	100%
3	Persentase Koperasi Patuh (%)	-	-	-	20	22	27	31	8	19	12	25	40%	86%	43%	81%
4	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang RAT (%)	-	-	-	0	6	7	8	0	13	7	6,91	0%	224%	100%	86,38%

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2022

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung pada tahun 2021, dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada RKPD 2021 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas **pengendalian atau monitoring** yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Tabel 2.4 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Bidang KUMKM

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualitas dan produktivitas Usaha Koperasi	Masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif	Belum optimalnya pendataan koperasi dan pembubaran koperasi
	Masih banyaknya koperasi yang tidak tertib administrasi	Kuranganya pemahaman SDM koperasi terhadap administrasi Koperasi
	Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai kaidah perkoperasian	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan koperasi
	Pengelolaan koperasi masih dilakukan secara konvensional	Fasilitasi Digitalisasi koperasi belum optimal
	Keterbatasan SDM Koperasi dalam mengakases teknologi informasi	SDM koperasi yang tidak mau beralih ke digital
	Masih Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif pada koperasi	Keberadaan sarana dan prasarana teknologi belum dimanfaatkan secara optimal
	Masih belum kurangnya SDM koperasi yang kompeten	Kurangnya pendidikan terhadap anggota koperasi
	Masih kurangnya pendampingan terhadap koperasi	Masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas diklat perkoperasian
		Terbatasnya SDM yang tersedia untuk melakukan pendampingan
	Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi dan lembaga lain	Kurangnya informasi/ fasilitasi yang tersedia
	Belum optimalnya kemampuan koperasi untuk menjangkau akses pasar	Masih banyak koperasi yang tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi untuk ke lembaga keuangan/ permodalan
	Belum optimalnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan	Banyak unit usaha koperasi yang masih berada dalam zona nyaman dan tidak melakukan inovasi
	Belum optimalnya koperasi dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan produk dan layanan bagi anggota	
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UMKM	Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholder koperasi	Masih adanya ego sektoral antar OPD
	Database yang dimiliki belum lengkap dan valid	Pengelolaan data yang tidak dilakukan dengan baik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih kurangnya pendampingan terhadap koperasi	Terbatasnya SDM yang tersedia
	Masih belum optimalnya fasilitasi *business matching*	Masih kurangnya dari sisi kuantitas
	Belum adanya PERDA UMKM	Perda UMKM masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD
	Kurangnya pendampingan dan layanan bisnis bagi UMKM	Terbatasnya ASN yg ada di Dinas
	Masih kurangnya personil ASN dalam pemberdayaan dan pendampingan UMKM	Banyaknya UMKM yang belum memenuhi persyaratan administrasi
	Kurangnya fasilitasi terhadap lembaga permodalan/ pembiayaan	Belum adanya sarana dan prasarana untuk sentra produk UMKM
	Kurangnya sentra produk-produk UMKM	Masih kurangnya sosialisasi kepada UMKM terkait fasilitasi sertifikat produk
	Masih banyak UMKM yang belum terfasilitasi sertifikat produk (Halal, HAKI, PIRT)	Belum adanya sarana mobil promosi
	Kurangnya pendataan UMKM secara menyeluruh	
	Kurangnya saran dan prasarana informasi dan promosi	
Belum Optimalnya Kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Masih kurangnya kapasitas SDM pelaku UMKM dalam pengembangan produk	Banyak para pelaku umkm yang masih berpendidikan SD, SMP dan SMA dan belum mendapatkan peatihan bisnis
		Masih belum optimalnya pelatihan bagi pelaku UMKM
		Keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi informasi
		Perekrutan tenaga kerja berdasarkan kerabat dekat, bukan berdasarkan keahlian
	Masih kuranganya kemampuan manajemen usaha UMKM	Usaha merupakan turun temurun dari orang tua
	Kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi target produksi sesuai permintaan pasar	Kekurangan modal dan sarana prasarana tidak mendukung untuk produksi banyak
	Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM	Perputaran penjualan sedikit sehingga margin yang didapat kurang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kemampuan UMKM dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan	Banyak UMKM yang tidak bisa melengkapi adiministrasi ke lembaga keuangan
		Promosi tentang pentingnya sertifikat produk bagi UMKM kurang maksimal
	Masih kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi produk	Sarana dan prasarana yang tersedia belum optimal
		Banyaknya supplier sehingga meningkatnya harga bahan baku
	Kualitas packaging produk yang masih belum menarik	
	Keterbatasan bahan baku yang tersedia	Beberapa bahan baku sulit didapatkan atau musiman
	Terbatasnya kemampuan pelaku UMKM dalam menjangkau akses pasar	Kurangnya informasi yang diperoleh oleh UMKM terkait akses pasar dan jaringan usaha
	Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran UMKM	Tidak semua UMKM dapat terfasilitasi dalam bazar dan pameran
		Masih kurangnya fasilitasi promosi melalui pameran, bazaar, online market
	Pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk yang sejenis	Kurangnya inovasi dalam meningkatkan kualitas dan layanan produk
	Masih kurangnya *business matching*	Kurangnya pemetaan potensi dan kebutuhan

2.3.3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program

Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”** dan Misi ke 1 (satu) **”Membangkitkan daya saing daerah”** maka untuk tujuan dan sasaran Diskop UKM ditetapkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Diskop UKM

Berdasarkan telaahan tersebut maka perlu penjabaran lebih detil mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepada daerah. Berikut adalah hasil telaahannya :

Tabel 2.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ditinjau dari Sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi. : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera				
Misi: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
1	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	Belum optimalnya kapasitas UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Adanya UMKM dalam jumlah besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi dalam pengerak ekonomi	masih lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi
				kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi target produksi sesuai permintaan pasar
				Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM
				kurangnya inovasi dalam meningkatkan kualitas dan layanan produk

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi. : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera				
Misi: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
			Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro	Masih kurangnya Kapasitas SDM pelaku UMKM dalam Pengembangan Produk
				terbatasnya kemempuan pelaku usaha UMKM dalam menjangkau akses pasar
				belum optimalnya kemampuan UMKM dalam memgakses permodalan ke lembaga keuangan
				keterbatasan pelaku UMKM dalam mengakses teknologi informasi
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi koperasi dan UMKM	Adanya Perda UMKM	Perda UMKM masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD
			Adanya kerjasama yang baik antara Dinas, UMKM, koperasi, perguruan tinggi dan stakeholder terkait lainnya	belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholder dengan koperasi maupun UMKM
2	Terwujudnya Koperasi yang Berdaya Saing, Profesional, akuntabel dan modern	Masih rendahnya kualitas dan produktivitas usaha Koperasi	adanya pelatihan dan bimbingan teknis untuk koperasi	terbatasnya SDM yang tersedia untik mengikutin pelatihan dan bimbingan teknis
				masih banyaknya kiperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai kaidah perkoperasian
			Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat setiap tahunnya	masih kurangnya pemahaman SDM koperasi terhadap administrasi koperasi
				masih banyaknya koperasi yang tidak tertib administrasi

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi. : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera				
Misi: Membangkitkan Daya Saing Daerah				
				kurangnya kesadarananggota koperasi untuk berpartisipasi aktif pada koperasi
				keterbatasan SDM Koperasi dalam mengakses teknologi informasi
			Adanya kerjasama yang baik antara Dinas, koperasi, perguruan tinggi dan stakeholder terkait lainnya	belum optimalnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan ke lembaga keuangan
				belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi dan lembaga lainnya

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2021

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung kedepan yakni :

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Diskop UKM

   SOTK Dinas Koperasi dan UKM dinilai masih kurang optimal untuk mengakomodir amanat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019, sehingga sasaran pembangunan yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan akan sulit tercapai.

2. Nomenklatur Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM

   Nomenklatur baik untuk setiap bidang masih belum mencerminkan fungsi kebijakan dan tujuan organisasi. Untuk itu indikator kinerja setiap bidang kurang memenuhi kaidah indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely (SMART).* Selain itu, berdampak juga pada kegiatan pada masing-

masing bidang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

3. Belum adanya Proses bisnis pada tingkat struktur eselon

   Pada tingkat struktur eselon II atau Kepala Dinas, belum terdapat keterkaitan proses bisnis yang jelas serta jenjang struktur di setiap bidang sampai dengan eselon IV juga masih belum memiliki keterkaitan hubungan kerja *(Business Process)* yang jelas dan terukur, sehingga penyusunan peta proses bisnis harus dilaksanakan.

4. Fungsi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi

   Fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan dengan optimal.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung kedepan yakni :

1. Kondisi Umum Kabupaten Bandung

   Berbagai faktor kondisi umum Kabupaten Bandung, seperti kondisi geografis, demografis, perekonomian, sosial dan infrastruktur memberikan peluang yang cukup besar bagi perkembangan koperasi di Kabupaten Bandung. Dari faktor demografis, kabupaten Bandung memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar. Hal ini dapat menjadi potensi calon anggota koperasi maupun pasar untuk produk dan jasa koperasi potensial. Dari berbagai indikator makro ekonomi, seperti PDRB dan PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat dan investasi, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini mestinya menjadi peluang bagi pengembangan usaha koperasi. Selanjutnya perkembangan dari berbagai lapangan usaha, terutama sektor pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan UMKM yang terus meningkat dalam jumlah pelaku, volume usaha dan kebutuhan input produksi untuk usaha di sektor tersebut juga dapat menjadi peluang yang menarik bagi koperasi untuk melayani kebutuhan input ataupun pemasaran output pada sektor tersebut. Kabupaten Bandung juga memiliki

lokasi yang strategis dan menghasilkan produk-produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan selain pasar Kabupaten Bandung sendiri juga Kota Bandung dan Jakarta

2. Animo Masyarakat untuk mendirikan Koperasi dan UKM

   Adanya orang-orang di perusahaan, instansi pemerintah atau lingkungan tempat tinggal yang memiliki animo untuk mendirikan koperasi, tentunya merupakan peluang pengembangan koperasi yang potensial. Jika dilihat pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Generasi yang banyak tergabung dalam koperasi dan UMKM adalah generasi milenial, dimana generasi ini merupakan usia produktif sekaligus market yang konsumtif dan generasi ini juga dinilai sanggup menyerap teknologi dengan cepat.

3. Regulasi yang mendukung Koperasi

   Regulasi pemerintah berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan atau kebijakan lainnya yang mendukung berkembangnya koperasi, merupakan peluang untuk penguatan koperasi, atau akses terhadap sumber daya dan jaringan usaha.

4. Pasar KUMKM terbuka luas

   Produk KUMKM yang bermacam-macam dengan berbagai produk unggulannya merupakan produk yang bebas dijual dan dibutuhkan oleh banyak orang dapat dipasarkan tidak hanya di Kabupaten Bandung, dengan dukungan berbagai platform pemasaran yang telah ada sangat memungkinkan berbagai produk koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung dipasarkan ke seluruh kota/daerah Indonesia bahkan dapat diekspor ke mancanegara.

5. Peluang Pengembangan usaha luas

   Koperasi dapat bergerak di berbagai sektor dan bidang usaha. Koperasi produsen yang anggotanya petani, peternak dan perajin dapat mengusahakan berbagai kebutuhan untuk memfasilitasi usaha anggota seperti penyediaan input, proses produksi dan

pemasaran hasil produksi. Koperasi pedagang dapat menyediakan barang dagangan dan usaha lainnya untuk kepentingan usaha anggota sebagai pedagang. Koperasi konsumen dapat menyediakan berbagai kebutuhan anggota sebagai konsumen. Jadi peluang usaha koperasi sangat luas, karena pada dasarnya koperasi dapat mengusahakan berbagai kebutuhan anggota dan masyarakat.

6. Dukungan dari Pemangku Kepentingan

   Banyak dukungan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada koperasi dan UMKM, misalnya pinjaman modal dana bergulir, dukungan dari lembaga keuangan berupa fasilitasi kredit atau kerja sama untuk penyaluran kredit bagi anggota koperasi. Dunia industri yang menyerap hasil produksi petani, peternak, perajin yang dipasarkan oleh koperasi.

2.3.5. Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan produktivitas usaha koperasi.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UMKM.
3. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas UMKM.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada bagian review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perangkat Daerah: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**- Nilai AKIP - Nilai IKM - Aset dalam Kondisi Baik**	**KAB BANDUNG**	**75,12 poin 82,64 poin 95,32 poin**	**9.079.822.000,00**	**KAB BANDUNG**	**78,35 poin 82,64 poin 95,32 poin**	**15.674.789.942,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Ketercapaian Kinerja Hasil Perencanaan**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**263.000.000,00**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**265.878.000,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB BANDUNG	4 Dokumen	155.000.000,00	KAB BANDUNG	4 Dokumen	153.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KAB BANDUNG	2 Dokumen	7.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Dokumen	7.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KAB BANDUNG	2 Dokumen	8.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Dokumen	8.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	KAB BANDUNG	2 Dokumen	3.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Dokumen	3.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KAB BANDUNG	2 Dokumen	3.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Dokumen	3.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB BANDUNG	4 Laporan	27.000.000,00	KAB BANDUNG	4 Laporan	19.878.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB BANDUNG	2 Laporan	60.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Laporan	72.000.000,00

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**6.990.527.000,00**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**8.300.774.942,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB BANDUNG	38 Orang / Bulan	6.959.027.000,00	KAB BANDUNG	38 Orang / Bulan	8.274.074.942,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KAB BANDUNG	1 Dokumen	8.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	6.200.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KAB BANDUNG	1 Dokumen	2.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	2.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB BANDUNG	2 Dokumen	2.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Dokumen	2.000.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	KAB BANDUNG	1 Dokumen	2.500.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	2.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KAB BANDUNG	5 Laporan	17.000.000,00	KAB BANDUNG	5 Laporan	14.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**10.500.000,00**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**19.000.000,00**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KAB BANDUNG	1 Dokumen	3.500.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	2.000.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB BANDUNG	4 Laporan	3.000.000,00	KAB BANDUNG	4 Laporan	3.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KAB BANDUNG	2 Laporan	4.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Laporan	14.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**175.550.000,00**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**175.550.000,00**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KAB BANDUNG	3 Dokumen	12.000.000,00	KAB BANDUNG	3 Dokumen	12.000.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	KAB BANDUNG	1 Dokumen	5.500.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	5.500.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	KAB BANDUNG	1 Dokumen	3.500.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	3.500.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KAB BANDUNG	38 Orang	154.550.000,00	KAB BANDUNG	38 Orang	154.550.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**500.000.000,00**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**602.815.000,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KAB BANDUNG	1 Paket	10.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Paket	16.450.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB BANDUNG	7 Paket	150.000.000,00	KAB BANDUNG	7 Paket	155.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB BANDUNG	1 Paket	10.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Paket	18.200.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KAB BANDUNG	6 Paket	40.000.000,00	KAB BANDUNG	6 Paket	63.134.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	KAB BANDUNG	1 Dokumen	10.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	16.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	KAB BANDUNG	1 Paket	5.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Paket	15.500.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB BANDUNG	12 Laporan	20.000.000,00	KAB BANDUNG	12 Laporan	50.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB BANDUNG	12 Laporan	180.000.000,00	KAB BANDUNG	12 Laporan	167.131.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KAB BANDUNG	1 Dokumen	75.000.000,00	KAB BANDUNG	1 Dokumen	101.400.000,00

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**KAB BANDUNG**	**95,32%**	**26.861.000,00**	**KAB BANDUNG**	**95,32%**	**15.713.600,00**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	KAB BANDUNG		-	KAB BANDUNG		-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	KAB BANDUNG	6 Unit	26.861.000,00	KAB BANDUNG	6 Unit	15.713.600,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**584.035.000,00**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**1.386.789.400,00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB BANDUNG	12 Laporan	47.275.000,00	KAB BANDUNG	12 Laporan	149.743.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	KAB BANDUNG	12 Laporan	536.760.000,00	KAB BANDUNG	12 Laporan	1.237.046.400,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Aset dalam Kondisi Baik**	**KAB BANDUNG**	**95,32%**	**529.349.000,00**	**KAB BANDUNG**	**95,32%**	**4.908.269.000,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB BANDUNG	1 Unit	27.750.000,00	KAB BANDUNG	1 Unit	40.330.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB BANDUNG	18 Unit	140.700.000,00	KAB BANDUNG	18 Unit	307.040.000,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	KAB BANDUNG	35 Unit	6.000.000,00	KAB BANDUNG	35 Unit	6.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KAB BANDUNG	30 Unit	36.000.000,00	KAB BANDUNG	30 Unit	36.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KAB BANDUNG	2 Unit	318.899.000,00	KAB BANDUNG	2 Unit	4.518.899.000,00
Jumlah 1				**9.079.822.000,00**			**15.674.789.942,00**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Koperasi yang berizin**	**KAB BANDUNG**	**60%**	**125.000.000,00**	**KAB BANDUNG**	**60%**	**125.000.000,00**
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**KAB BANDUNG**	**14%**	**75.000.000,00**	**KAB BANDUNG**	**14%**	**75.000.000,00**
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota	KAB BANDUNG	10 Unit Usaha	75.000.000,00	KAB BANDUNG	10 Unit Usaha	75.000.000,00
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**KAB BANDUNG**	**8%**	**50.000.000,00**	**KAB BANDUNG**	**8%**	**50.000.000,00**
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB BANDUNG	5 Unit Usaha	50.000.000,00	KAB BANDUNG	5 Unit Usaha	50.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Patuh**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**687.152.000,00**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**787.152.000,00**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**687.152.000,00**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**787.152.000,00**
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BANDUNG	60 Unit Usaha	358.475.000,00	KAB BANDUNG	60 Unit Usaha	458.475.000,00

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BANDUNG	60 Unit Usaha	328.677.000,00	KAB BANDUNG	60 Unit Usaha	328.677.000,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Koperasi sehat**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**443.050.000,00**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**443.050.000,00**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**443.050.000,00**	**KAB BANDUNG**	**40%**	**443.050.000,00**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	KAB BANDUNG	60 Unit Usaha	343.050.000,00	KAB BANDUNG	60 Unit Usaha	343.050.000,00
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	KAB BANDUNG	3 Unit Usaha	100.000.000,00	KAB BANDUNG	3 Unit Usaha	100.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM koperasi yang kompeten**	**KAB BANDUNG**	**16,78%**	**292.826.650,00**	**KAB BANDUNG**	**16,78%**	**542.826.650,00**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi**	**KAB BANDUNG**	**8%**	**292.826.650,00**	**KAB BANDUNG**	**8%**	**542.826.650,00**
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	KAB BANDUNG	460 Orang	292.826.650,00	KAB BANDUNG	460 Orang	542.826.650,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi**	**KAB BANDUNG**	**1,00%**	**1.015.967.000,00**	**KAB BANDUNG**	**1,00%**	**1.015.967.000,00**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**1.015.967.000,00**	**KAB BANDUNG**	**100%**	**1.015.967.000,00**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, PenataanManajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	KAB BANDUNG	230 Unit Usaha	945.967.000,00	KAB BANDUNG	230 Unit Usaha	945.967.000,00

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	KAB BANDUNG	50 Keluarga	70.000.000,00	KAB BANDUNG	50 Keluarga	70.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Kapasitas Usaha Mikro**	**KAB BANDUNG**	**8,50%**	**768.017.000,00**	**KAB BANDUNG**	**8,50%**	**2.118.017.000,00**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase usaha mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan**	**KAB BANDUNG**	**8,50%**	**768.017.000,00**	**KAB BANDUNG**	**8,50%**	**2.118.017.000,00**
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	KAB BANDUNG	2 Dokumen	150.000.000,00	KAB BANDUNG	2 Dokumen	150.000.000,00
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	KAB BANDUNG	280 Unit Usaha	100.000.000,00	KAB BANDUNG	280 Unit Usaha	100.000.000,00
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	KAB BANDUNG	350 Unit Usaha	100.000.000,00	KAB BANDUNG	350 Unit Usaha	100.000.000,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	KAB BANDUNG	200 Unit Usaha	100.000.000,00	KAB BANDUNG	650 Unit Usaha	1.450.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	KAB BANDUNG	50 Orang	100.000.000,00	KAB BANDUNG	50 Orang	100.000.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	KAB BANDUNG	2.000 Orang	218.017.000,00	KAB BANDUNG	2.000 Orang	218.017.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Kualitas usaha mikro**	**KAB BANDUNG**	**20%**	**1.101.913.268,00**	**KAB BANDUNG**	**20%**	**1.651.913.268,00**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan Usaha**	**KAB BANDUNG**	**20%**	**1.101.913.268,00**	**KAB BANDUNG**	**20%**	**1.651.913.268,00**

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023					Hasil Analisa Kebutuhan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif**
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	KAB BANDUNG	350 Unit Usaha	1.101.913.268,00	KAB BANDUNG	350 Unit Usaha	1.651.913.268,00
Jumlah 2				**4.433.925.918,00**			**6.683.925.918,00**
Jumlah Total				**13.513.747.918,00**			**22.358.715.860,00**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.5.1.Telaahan Terhadap Usulan Musrenbang

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat
Kab. Bandung Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Arjasari	Wargaluyu	8	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Baleendah	Jelekong	2	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Baleendah	Wargamekar	13	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Banjaran	Banjaran Wetan	6	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Banjaran	Kamasan	2	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Cilengkrang	Girimekar	25	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Cilengkrang	Cipanjalu	6	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Cimaung	Cikalong	8	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Dayeuhkolot	Sukapura	21	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Katapang	Sukamukti	10	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Kutawaringin	Padasuka	9	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Majalaya	Majasetra	33	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Margahayu	Magahayu Selatan	20	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Pangalengan	Banjarsari	4	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Paseh	Sukamanah	20	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Pasirjambu	Pasirjambu	5	Orang
				#MS Sosialisasi Pemahaman dan	Solokanjeruk	Solokanjeruk	20	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				Pengetahuan Perkoperasian				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Arjasari	Ancolmekar	3	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Baleendah	Jelekong	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Baleendah	Bojongmalaka	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Baleendah	Andir	1	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Baleendah	Malakasari	1	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Baleendah	Malakasari	1	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Banjaran	Pasirmulya	1	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Banjaran	Tarajusari	1	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Bojongsoang	Tegalluar	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Cangkuang	Cangkuang	6	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Cilengkrang	Ciporeat	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Cileunyi	Cinunuk	7	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Cimaung	Campakamulya	5	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Dayeuhkolot	Citeureup	3	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Katapang	Banyusari	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kutawaringin	Cilame	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Kutawaringin	Jelegong	3	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Margahayu	Margahayu Tengah	5	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pacet	Mekarjaya	4	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pacet	Sukarame	16	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pacet	Maruyung	1	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pameungpeuk	Langonsari	6	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Paseh	Drawati	3	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Paseh	Karangtunggal	2	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pasirjambu	Mekarsari	5	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pasirjambu	Tenjolaya	3	Orang
				#MS Kemitraan Usaha bagi UMKM	Rancabali	Alamendah	10	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Arjasari	Baros	14	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Bojongsoang	Lengkong	11	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Cicalengka	Narawita	20	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Cileunyi	Cileunyi Kulon	4	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Cileunyi	Cimekar	10	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Cimaung	Pasirhuni	10	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Ciparay	Sarimahi	21	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Ibun	Pangguh	10	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Katapang	Katapang	10	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Katapang	Pangauban	24	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kertasari	Cibeureum	4	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kertasari	Sukapura	9	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kertasari	Cihawuk	11	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kertasari	Tarumajaya	20	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kertasari	Resmi Tingal	4	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kutawaringin	Kopo	6	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Kutawaringin	Buninagara	8	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Pameungpeuk	Bojongkunci	10	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Pameungpeuk	Sukasari	11	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Pangalengan	Pangalengan	17	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Paseh	Cijagra	7	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Pasirjambu	Cisondari	4	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Pasirjambu	Tenjolaya	10	Orang
				#MS Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Rancabali	Sukaresmi	13	Orang
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Cimaung	Warjabakti	5	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Ciparay	Babakan	7	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Dayeuhkolot	Cangkuang Wetan	2	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Dayeuhkolot	Cangkuang Kulon	3	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Ibun	Sudi	5	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Ibun	Lampegan	10	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Kutawaringin	Cibodas	5	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Kutawaringin	Kopo	2	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Margahayu	Sukamenak	5	Orang
				#MS Pendampingan Usaha bagi UMKM	Pasirjambu	Tenjolaya	9	Orang
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Arjasari	Batukarut	30	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Jelekong	2	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Jelekong	2	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Bojongmalaka	2	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Andir	5	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Manggahang	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Malakasari	3	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Baleendah	4	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Baleendah	Baleendah	4	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Banjaran	Banjaran Wetan	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Banjaran	Tarajusari	5	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Banjaran	Tarajusari	5	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Banjaran	Sindangpanon	3	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Banjaran	Margahurip	4	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Banjaran	Kamasan	3	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Bojongsoang	Bojongsari	3	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Bojongsoang	Tegalluar	7	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Bojongsoang	Lengkong	8	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Bojongsoang	Bojongsoang	3	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Bojongsoang	Cipagalo	3	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cangkuang	Ciluncat	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cangkuang	Jatisari	7	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cicalengka	Nagrog	35	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cikancung	Tanjunglaya	17	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cikancung	Mekarlaksana	17	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cikancung	Ciluluk	16	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cilengkrang	Melatiwangi	7	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cilengkrang	Jatiendah	7	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cilengkrang	Cilengkrang	7	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cileunyi	Cileunyi Wetan	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cileunyi	Cibiru Wetan	24	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cimaung	Sukamaju	20	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Cimenyan	Sindanglaya	50	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ciparay	Mangunharja	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ciparay	Mangunharja	15	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ciwidey	Sukawening	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ciwidey	Nengkelan	13	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ciwidey	Lebakmuncang	10	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ciwidey	Panyocokan	13	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ibun	Laksana	5	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Ibun	Ibun	3	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Katapang	Gandasari	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kertasari	Cikembang	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kertasari	Resmi Tingal	11	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kutawaringin	Jatisari	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kutawaringin	Kopo	4	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Majalaya	Majasetra	35	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Margaasih	Lagadar	13	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Margaasih	Nanjung	13	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Margaasih	Cigondewah Hilir	16	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Margahayu	Sayati	17	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Nagreg	Citaman	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Nagreg	Ciherang	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Nagreg	Ciaro	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Nagreg	Nagreg	10	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pacet	Mandalahaji	9	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pameungpeuk	Bojongmanggu	13	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pangalengan	Margamukti	9	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pangalengan	Margamekar	7	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Paseh	Sindangsari	11	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Paseh	Cijagra	12	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Paseh	Cigentur	11	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pasirjambu	Cibodas	4	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pasirjambu	Cisondari	5	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pasirjambu	Pasirjambu	5	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Pasirjambu	Sugihmukti	5	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Rancabali	Alamendah	16	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Rancaekek	Rancaekek Kulon	23	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Rancaekek	Cangkuang	24	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Solokanjeruk	Cibodas	14	Orang
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Solokanjeruk	Bojongemas	15	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Volume	Satuan
				#MS Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Solokanjeruk	Rancakasumba	20	Orang
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	#MS Inkubasi Bisnis bagi UMKM	Pangalengan	Pulosari	3	Orang
				#MS Inkubasi Bisnis bagi UMKM	Pasirjambu	Cukanggenteng	2	Orang
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	#MS Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM	Pangalengan	Lamajang	1	Kegiatan

2.5.2.Telahaan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD

DPRD memberikan saran dan masukan terhadap perumusan Renja 2022 berdasarkan hasil reses dan aspirasi dari masyarakat. Masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan dan dicantumkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Rincian saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang disinergikan dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Dengan Pokok-Pokok Pikiran Daerah
Kab. Bandung

No.	Usulan	Sub Kegiatan	Volume	Perangkat Daerah	Validasi/ Keterangan
1.	#PK Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	350 Orang	Diskop UKM	Disetujui
2.	#PK Fasilitasi Izin Usaha bagi UMKM	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	32 Orang	Diskop UKM	Disetujui
3.	#PK Inkubasi Bisnis bagi UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	25 Orang	Diskop UKM	Disetujui
4.	#PK Kemitraan Usaha bagi UMKM	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	100 Orang	Diskop UKM	Disetujui
5.	#PK Pendampingan Usaha bagi UMKM	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	47 Orang	Diskop UKM	Disetujui
6.	#PK Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	4 Kegiatan	Diskop UKM	Disetujui
7.	#PK Sosialisasi Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	108 Orang	Diskop UKM	Disetujui

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2022; dan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung 2023.

Tujuan dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2023 menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai tahapan terakhir dari RPJPN Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, ditetapkan 4 (empat) pilar dari RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Ketujuh agenda pembangunan tersebut yaitu :

a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

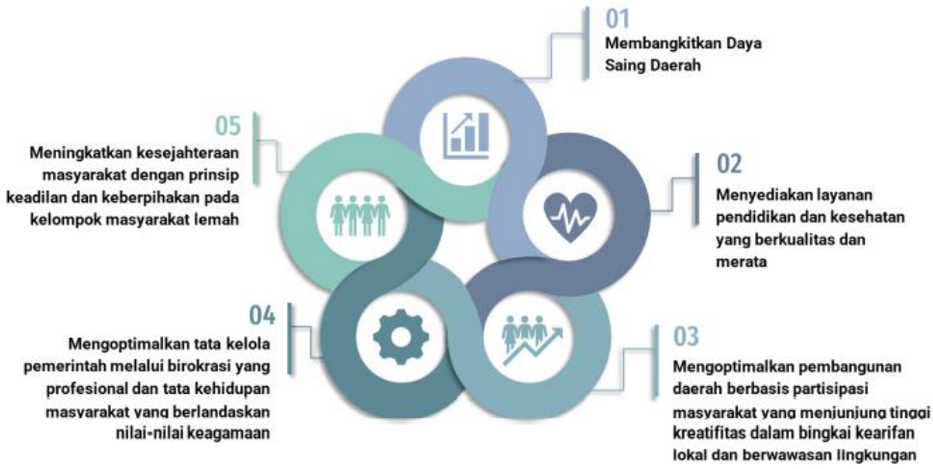
1.1.2.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, Bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan ruang;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

1.1.3.Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2023

Visi Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”. Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :



Gambar 3.1. Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM adalah :

Tabel 3.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Sasaran		Indikator Kinerja Daerah (IKD)		Target 2023
Misi 1 : Membangkitkan Daya Saing Daerah								
1.1	Membangkitkan Daya Saing Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,17%	1.1.2	Meningkatnya daya saing produk unggulan industri	1.1.2.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,67%
				1.1.3	Terwujudnya koperasi yang berdaya saing, profesional, akuntabel, dan modern	1.1.3.1	Persentase koperasi yang berkualitas	6%

Prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2023 perlu dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan baik pada tingkat Provinsi Jawa Barat maupun pada tingkat Nasional. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung

Urusan Koperasi dan UKM selaras dengan seluruh Prioritas Nasional, sehingga tingkat keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Nasional (PN) adalah 100%. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Bandung dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2.
Sinergi Prioritas Pembangunan Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
PN 1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
				Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi

Tabel 3.3.
Sinergi Prioritas Pembangunan Dan Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
PP 1	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	Revitalisasi manajemen data base industri, usaha mikro dan koperasi
PP 8	Gerakan membangun desa			Pembangunan ekosistem Simpul Inovasi bagi pemberdayaan pelaku usaha mikro
				Peningkatan daya saing usaha koperasi melalui peningkatan kualitas dan fasilitas usaha koperasi, perlindungan usaha serta peningkatan kualitas SDM-nya
				Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui pendampingan untuk

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
				pelaksanaan RAT, pendampingan koperasi serta peningkatan kualitas data koperasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOP UKM

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Diskop UKM Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Diskop UKM Kabupaten Bandung

Tujuan		Indikator Tujuan PD (IKU)		Target 2023	Sasaran		Indikator Sasaran PD		Target 2023
1	Meningkatnya Kompetensi serta daya saing usaha mikro dan koperasi	1.1	Laju pertumbuhan usaha mikro	12%	1.1.1	meningkatnya jumlah wirausaha baru	1.1.1.1	persentase Jumlah wirausaha baru yang tumbuh	8,50%
							1.1.1.2	meningkatnya kualitas usaha mikro	20%
		1.2	Persentase koperasi sehat	20%	1.2.1	Meningkatnya kepatuhan dan kesehatan koperasi	1.2.1.1	Persentase Koperasi Patuh	40%
							1.2.1.2	Persentase Koperasi sehat	40%
					1.2.2	Meningkatnya pemberdayaan dan kelembagaan koperasi	1.2.2.1	Persentase Koperasi aktif	52,7%
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi	2.1	Nilai AKIP	75,12 Point	2.1.1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM	2.1.1.1	Nilai AKIP	78,35 Point
		2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,64 Point			2.1.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,64 Point

Tujuan		Indikator Tujuan PD (IKU)		Target 2023	Sasaran		Indikator Sasaran PD		Target 2023
		2.3	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	95,32%			2.1.1.3	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	95,32%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan perumusan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektoral, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

Masyarakat Kabupaten Bandung memiliki potensi untuk dikembangkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya :

1) Banyaknya kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian,peternakan maupun olahan makanan sehingga dapat diarahkan untuk membentuk koperasi;
2) Lembaga Koperasi yang cukup banyak untuk dikembangkan;
3) Pelaku Usaha Mikro yang makin bertambah dari tahun ketahun;
4) Produk-produk koperasi dan pelaku usaha yang dapat bersaing dipasaran;

Diharapkan dengan pengembangan dan perberdayaan koperasi serta pelaku usaha Mikro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung dapat mendongkrak perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Perumusan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tahun 2023 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2021
3. Prioritas pengembangan Perkoperasian dan Usaha Mikro yang diwujudkan dalam Program/kegiatan
4. Kebijakan Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs dan TPB)

b. Rekapitulasi program dan kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung tahun 2023 terdiri dari 8 (delapan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan yang terbagi pada :

1) Urusan Rutin terdiri dari 1 (satu) program, 8 (delapan) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.
2) Urusan Koperasi dan UKM terdiri dari 7 (tujuh) program, 8 (delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

Kegiatan urusan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penyebarannya hampir seluruh wilayah Kabupatan Bandung karena dalam pelaksanannya merupakan program usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kecamatan dan ditindak lanjuti dalam Forum Perangkat Daerah.

c. Rumusan Program dan Kegiatan.

Rumusan program dan kegiatan tahun 2023 tersebut telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD 2023. Program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**25.694.715.860**				**13.513.747.918**
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Nilai IKM Aset dalam Kondisi Baik**		**76,47 Poin 83,56 Poin 95,32 %**	**11.475.675.742**	**APBD**		**76,77 Poin 84,23 Poin 95,82 %**	**9.079.822.000**
2.17.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***100 %***	***300.501.200***	**APBD**		***100 %***	***263.000.000***
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Bandung	4 Dokumen	181.321.200	APBD	Diskop UKM	4 Dokumen	155.000.000
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Bandung	1 Dokumen	7.500.000	APBD	Diskop UKM	2 Dokumen	7.000.000
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Bandung	2 Dokumen	9.000.000	APBD	Diskop UKM	2 Dokumen	8.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Bandung	1 Dokumen	2.500.000	APBD	Diskop UKM	2 Dokumen	3.000.000
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Bandung	3 Dokumen	2.000.000	APBD	Diskop UKM	2 Dokumen	3.000.000
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Bandung	4 Laporan	17.680.000	APBD	Diskop UKM	4 Laporan	27.000.000
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Bandung	4 Laporan	80.500.000	APBD	Diskop UKM	2 Laporan	60.000.000
2.17.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas***		***100 %***	***8.307.774.942***	**APBD**		***100 %***	***6.990.527.000***
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Bandung	40 Orang / Bulan	8.274.074.942	APBD	Diskop UKM	38 Orang / Bulan	6.959.027.000
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Bandung	1 Dokumen	6.200.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	8.000.000
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Bandung	- Dokumen	-	APBD	Diskop UKM	- Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Bandung	2 Laporan	8.000.000	APBD	Diskop UKM	2 Laporan	4.000.000
2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab.Bandung	1 Dokumen	2.500.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	2.500.000
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Bandung	5 Laporan	17.000.000	APBD	Diskop UKM	5 Laporan	17.000.000
2.17.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD***		***100 %***	***20.000.000***	**APBD**		***100 %***	***10.500.000***
2.17.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Bandung	1 Dokumen	2.000.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	3.500.000
2.17.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bandung	4 Laporan	3.000.000	APBD	Diskop UKM	4 Laporan	3.000.000
2.17.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Bandung	2 Laporan	15.000.000	APBD	Diskop UKM	2 Laporan	4.000.000
2.17.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian***		***100 %***	***178.900.000***	**APBD**		***100 %***	***175.550.000***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Bandung	3 Dokumen	15.000.000	APBD	Diskop UKM	3 Dokumen	12.000.000
2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Bandung	1 Dokumen	5.500.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	5.500.000
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Kab.Bandung	1 Dokumen	4.000.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	3.500.000
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Bandung	40 Orang	154.400.000	**APBD**		38 Orang	154.550.000
2.17.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran***		***40 %***	***667.039.800***	**APBD**		***60 %***	***500.000.000***
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Bandung	1 Paket	16.450.000	APBD	Diskop UKM	1 Paket	10.000.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Bandung	4 Paket	115.665.200	APBD	Diskop UKM	7 Paket	150.000.000
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Bandung	1 Paket	18.200.000	APBD	Diskop UKM	1 Paket	10.000.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab.Bandung	8 Paket	85.500.000	APBD	Diskop UKM	6 Paket	45.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kab.Bandung	2 Dokumen	18.500.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	10.000.000
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kab.Bandung	- Paket	-	APBD	Diskop UKM	- Paket	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Bandung	12 Laporan	49.940.000	APBD	Diskop UKM	12 Laporan	20.000.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Bandung	12 Laporan	283.084.600	APBD	Diskop UKM	12 Laporan	180.000.000
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Bandung	3 Laporan	79.700.000	APBD	Diskop UKM	1 Dokumen	75.000.000
2.17.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***		***95,32 %***	***15.713.600***	**APBD**		***95,82 %***	***26.861.000***
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel yang dibeli	Kab.Bandung	9 Unit	15.713.600	APBD	Diskop UKM	6 Unit	26.861.000
2.17.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai ketentuan***		***40 %***	***1.410.138.200***	**APBD**		***60 %***	***584.035.000***
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Bandung	12 Laporan	183.811.800	APBD	Diskop UKM	12 Laporan	47.275.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Bandung	12 Laporan	1.226.326.400	APBD	Diskop UKM	12 Laporan	536.760.000
2.17.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***		***95,32 %***	***575.608.000***	***APBD***		***95,82 %***	***529.349.000***
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Bandung	1 Unit	40.330.000	APBD	Diskop UKM	1 Unit	27.750.000
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Bandung	18 Unit	317.540.000	APBD	Diskop UKM	18 Unit	140.700.000
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab.Bandung	- Unit	-	APBD	Diskop UKM	- Unit	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Bandung	31 Unit	45.230.000	APBD	Diskop UKM	30 Unit	42.000.000
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Bandung	2 Unit	172.508.000	APBD	Diskop UKM	2 Unit	318.899.000
02:17:02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi yang berizin**		**56,45** %	**125.000.000**	**APBD**		**57,8** %	**125.000.000**
2.17.02.01	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota***		***14*** %	***75.000.000***	***APBD***		***21*** %	***75.000.000***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Bandung	744 Unit Usaha	75.000.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	744 Unit Usaha	75.000.000
2.17.02.02	***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi yang difasilitasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas***		***8*** %	***50.000.000***	**APBD**		***12*** %	***50.000.000***
2.17.02.02.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	16 Unit Usaha	50.000.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	16 Unit Usaha	50.000.000
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Patuh**		**20** %	**937.152.000**	**APBD**		**20** %	**687.152.000**
2.17.03.2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diperiksa dan diawasi***		***40*** %	***937.152.000***	***APBD***		***60*** %	***687.152.000***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	60 Unit Usaha	508.475.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	60 Unit Usaha	358.475.000
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	210 Unit Usaha	428.677.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	60 Unit Usaha	328.677.000
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**		**20** %	**643.050.000**	**APBD**		**20** %	**443.050.000**
2.17.04.2.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya***		***40*** %	***643.050.000***	***APBD***		***60*** %	***443.050.000***
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab.Bandung	60 Unit Usaha	543.050.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	60 Unit Usaha	343.050.000
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Kab.Bandung	3 Unit Usaha	100.000.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	3 Unit Usaha	100.000.000
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten**		**13,54** %	**734.826.650**	**APBD dan APBN**		**14,14** %	**292.826.650**
2.17.05.2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan***	***Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan koperasi***		***8*** %	***734.826.650***	***APBD dan APBN***		***12*** %	***292.826.650***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab.Bandung	640 Orang	734.826.650	APBD dan APBN	Koperasi di Kabupaten Bandung	460 Orang	292.826.650
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi**		**1** %	**1.940.081.200**	**APBD**		**1,5** %	**1.015.967.000**
2.17.06.2.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase koperasi yg difasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi koperasi***		***100*** %	***1.940.081.200***	***APBD***		***100*** %	***1.015.967.000***
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Bandung	260 Unit Usaha	1.840.052.200	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	230 Unit Usaha	945.967.000
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab.Bandung	50 Keluarga	100.029.000	APBD	Koperasi di Kabupaten Bandung	50 Keluarga	70.000.000,00
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Kapasitas Usaha Mikro**		**3,14** %	**7.182.017.000**	**APBD**		**3,35** %	**768.017.000**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.07.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Persentase usaha mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan***		***3,14*** %	***7.182.017.000***	***APBD***		***3,35*** %	***768.017.000***
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah didata Potensi dan Pengembangannya	Kab.Bandung	2610 Unit Usaha	150.000.000	APBD	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	2923 Unit Usaha	150.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab.Bandung	300 Unit Usaha	697.000.000	APBD	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	280 Unit Usaha	100.000.000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab.Bandung	450 Unit Usaha	310.000.000	APBD	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	350 Unit Usaha	100.000.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab.Bandung	100 Unit Usaha	4.553.000.000	APBD	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	200 Unit Usaha	100.000.000
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab.Bandung	111 Orang	100.000.000	APBD	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	50 Orang	100.000.000
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab.Bandung	1395 Orang	1.372.017.000	APBD	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	2000 Orang	218.017.000
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil**		**7,92** %	**2.656.913.268**	**APBD dan APBN**		**7,92** %	**1.101.913.268**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.17.08.2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil***		***10*** %	***2.656.913.268***	***APBD dan APBN***		***10*** %	***1.101.913.268***
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab.Bandung	105 Unit Usaha	2.656.913.268	APBD dan APBN	Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung	350 Unit Usaha	1.101.913.268

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**25.694.715.860**
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Nilai IKM Aset dalam Kondisi Baik**	**76,47 Poin 83,56 Poin 95,32 %**	**11.475.675.742**
2.17.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100 %***	***300.501.200***
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	181.321.200
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	9.000.000
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	2.000.000
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.680.000
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.500.000
2.17.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas***	***100 %***	***8.307.774.942***
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang / Bulan	8.274.074.942
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	6.200.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dokumen	-
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.000.000
2.17.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	17.000.000
2.17.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD***	***100 %***	***20.000.000***
2.17.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000
2.17.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.000.000
2.17.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000
2.17.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian***	***100 %***	***178.900.000***
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	15.000.000
2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.500.000
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.000.000
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	154.400.000
2.17.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran***	***40 %***	***667.039.800***
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.450.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.665.200
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.200.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	85.500.000
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	18.500.000
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	- Paket	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.940.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	283.084.600
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Laporan	79.700.000
2.17.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***	***95,32 %***	***15.713.600***
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebel yang dibeli	9 Unit	15.713.600
2.17.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang sesuai ketentuan***	***40 %***	***1.410.138.200***
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.811.800
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.226.326.400
2.17.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Aset dalam Kondisi Baik***	***95,32 %***	***575.608.000***
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.330.000
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	317.540.000
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Unit	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	45.230.000
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	172.508.000
02:17:02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Koperasi yang berizin**	**56,45** %	**125.000.000**
2.17.02.01	***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota***	***14*** %	***75.000.000***
2.17.02.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasidengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	744 Unit Usaha	75.000.000
2.17.02.02	***Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi yang difasilitasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas***	***8*** %	***50.000.000***
2.17.02.02.1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit Usaha	50.000.000
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Patuh**	**20** %	**937.152.000**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.17.03.2.01	***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diperiksa dan diawasi***	***40*** %	***937.152.000***
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	508.475.000
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Unit Usaha	428.677.000
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**20** %	**643.050.000**
2.17.04.2.01	***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai kesehatannya***	***40*** %	***643.050.000***
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	60 Unit Usaha	543.050.000
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan	3 Unit Usaha	100.000.000
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten**	**13,54** %	**734.826.650**
2.17.05.2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan koperasi***	***8*** %	***734.826.650***
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	640 Orang	734.826.650
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi**	**1** %	**1.940.081.200**
2.17.06.2.01	***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase koperasi yg difasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi koperasi***	***100*** %	***1.940.081.200***
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, AksesPembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Unit Usaha	1.840.052.200
2.17.06.2.01.02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	100.029.000
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Kapasitas Usaha Mikro**	**3,14** %	**7.182.017.000**
2.17.07.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,***	***Persentase usaha mikro yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan***	***3,14*** %	***7.182.017.000***

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah didata Potensi dan Pengembangannya	2610 Unit Usaha	150.000.000
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	697.000.000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	450 Unit Usaha	310.000.000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	4.553.000.000
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	111 Orang	100.000.000
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1395 Orang	1.372.017.000
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil**	**7,92** %	**2.656.913.268**
2.17.08.2.01	***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi usaha kecil***	***10*** %	***2.656.913.268***
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	105 Unit Usaha	2.656.913.268

Sumber : Hasil Analisis Diskop UKM, 2022

4.2. INOVASI TAHUN 2023

Adanya program Inovasi pada Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan masyarakat guna merespon terhadap tantangan pembangunan yang ada. Program inovasi ini merupakan sebuah bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan pelaku koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan adanya program inovasi ini akan membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam meningkatkan potensi diri. Program inovasi tersebut yaitu:

4.2.1.SIBANGKIT UKM BEDAS

SIBANGKIT UKM BEDAS merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan database UMKM, Promosi, dan Pemasaran Usaha Mikro di Kabupaten Bandung. Melihat kondisi

eksisting di Kabupaten Bandung, permasalahan Usaha Mikro yang terjadi adalah:

1. Belum adanya regulasi yang jelas terkait pengembangan usaha mikro
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengemvangan usaha mikro baik sarana media teknologi informasi maupun outlet pemasaran untuk usaha mikro
3. Belum meningkatnya promosi dan pemasaran usaha mikro
4. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan media teknologi informasi
5. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perijinan dan sertifikasi produk

Dengan melihat visi Kabupaten Bandung yaitu "**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera"** dan dengan upaya menjalankan misi **"Membangkitkan Daya Saing Daerah"** serta mengantisipasi permasalahan UMKM maka Dinas Koperasi dan UKM membuat sebuah gagasan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro terutama untuk meningkatkan promosi dan pemasaran usaha mikro dan pemenuhan pelayanan UMKM dengan membuat **Sistem Informasi Bangkit UKM (SIBANGKIT UKM) Bedas** Kabupaten Bandung.

Dengan adanya SIBANGKIT UKM ini terdapat manfaat yang ingin dicapai baik untuk internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM, yaitu:

1. **Internal**. Yaitu bagi individu (petugas Pelayanan promosi dan pemasaran), dengan adanya aplikasi ini akan meningkatkan kompetensi, semangat dan tanggung jawab kerja bagi para ASN yang bertugas dalam pelayanan fasilitasi promosi dan Pemasaran Usaha mikro. Dan organisasi yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang akan memudahkan informasi usaha mikro dan menampilkan data yang ter-update terkait promosi dan pemasaran usaha mikro sebagai bahan evaluasi dan monitoring kinerja organisasi.
2. **Eksternal**. Yaitu bagi stakeholder (masyarakat, Pelaku Usaha Mikro, Komunitas UMKM, KADIN, HIPPMI, Pemerintah Daerah. Kinerja pengembangan promosi dan pemasaran produk usaha mikro

menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan dan fasilitasi pengembangan dan pemasaran usaha mikro.

Selain itu, dengan adanya SIBANGKIT UKM BEDAS diharapkan akan tersedianya:

1. Layanan fasilitas promosi dan pameran
2. Layanan perijinan OSS (NIB)
3. Layanan HKI
4. Layanan UMKM lainnya (pelatihan kewirausahaan, kemitraan, intermediasi, sosialiasi, inkubasi bisnis, rekomendasi dan pendampingan)
5. Database UMKM Kabupaten Bandung.

4.2.2.SAKU BEDAS

Solusi Aksi Kanggo Usaha (SAKU) Bedas yaitu kegiatan tindak lanjut dari hasil Identifikasi Temuan Lapangan baik dari Kegiatan Bunga Desa ataupun hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Pelaku UKM dan Koperasi. Isi Kegiatan dari SAKU Bedas diantaranya :

1. Monitoring dan Identifikasi Lapangan ke wilayah
2. Layanan perijinan OSS (NIB) dan Sertifikasi Produk bagi UMKM
3. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM
4. Inkubasi Bisnis
5. Pendampingan Usaha
6. Kemitraan dan Gelar Produk/ Pameran

4.2.3.SIMANJUR BEDAS

Sistem Informasi Monitoring Pinjaman Dana Bergulir (SIMANJUR) Bedas yaitu layanan informasi dan monitoring Program Prioritas Bupati Bandung yaitu Pemberian Pinjaman Dana Bergulir berbasis aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk memantau perkembangan dana bergulir yang telah disalurkan oleh perbankan, serta dapat melihat pinjaman macet sampai ke tingkat RW

BAB V
PENUTUP

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung diharapkan prioritas program dan kegiatan dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 dengan memperhatikan komposisi antara pencapaian sasaran program/kegiatan dengan pagu anggaran yang tersedia masih dirasakan belum sesuai kebutuhan, karena masih ada kegiatan yang menjadi prioritas belum memiliki anggaran.

Dalam pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih terkendala pada terbatasnya sumber daya manusia aparatur dinas seperti tenaga penyuluh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dan keterbatasan angaran yang perlu dioptimalkan.

Demikian dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung kami susun. Kami sadari dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

DINDIN SYAHIDIN
Pembina Tk. I/ IV-b
NIP. 19720308 199101 1 001

BUPATI BANDUNG

M. DADANG SUPRIATNA